

Pembinaan Warga Gereja untuk Pendidikan Politik di GPIG Jemaat Imanuel Kaaruyan Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo

Marco J. Lengekey

Institut Agama Kristen Negeri Manado

Submit :

Revision :

Accept :

Abstract

The purpose of this study is to describe the implementasiton of Pembinaan Warga Gereja to conduct learning through political education in the church to overcome the views of congregation members about politics that are considered dirty and inappropriate to be carried out in the church in any form. This study uses descriptive ulittive research conducted t the GPIG Imanuel Kaaruyan congregation in 2024. Date collected by researchers through documentation, observation and interview technniques conducted directly in the congregation in Kaaruyan village.

Keywords: Church Membership Development, Political Education

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan Pembinaan Warga Gereja untuk melakukan pembelajaran lewat pendidikan politik di gereja untuk mengatasi pandangan-pandangan warga jemaat tentang politik yang dianggap kotor dan tidak layak dilakukan di dalam gereja dalam bentuk apapun. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang dilaksanakan di GPIG jemaat Imanuel Kaaruyan pada tahun 2024. Data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui teknik dokumentasi, observasi dan wawancara yang dilakukan secara langsung di Jemaat yang berada di desa Kaaruyan

Kata Kunci: Pembinaan Warga Gereja, Pendidikan Politik

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem presidensial, dimana adanya pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif yang berdasarkan checks and balances atau saling kontrol dan seimbang untuk saling mengontrol kekuasaan satu dengan kekuasaan yang lainnya agar tidak melampaui batas kekuasaan yang seharusnya dan saling menjatuhkan. Dan semua itu bagian dari dinamika berpolitik di Indonesia.

Politik hadir untuk mengatur setiap sistem yang dijalankan dalam roda pemerintahan yang ada di Indonesia, tapi politik sering kali dianggap oleh setiap kalangan adalah kotor seperti gereja yang sangat sensitif terhadap politik yang dianggap bahwa pemangku kekuasaan lebih mementingkan diri mereka dibanding dengan masyarakat. Oleh karena itu sikap gereja seharusnya turut bertanggung jawab mendidik umatnya untuk memiliki kesadaran politik dan mendukung pemerintahan yang baik dan benar serta bersikap kritis secara objektif terhadap pemerintahan yang ada. Gereja tidak hanya berpangku tangan dalam memelihara keutuhan NKRI, melainkan terlibat dalam menyuarakan kebenaran dan keadilan demi untuk kesejahteraan bersama.

Pendidikan Agama Kristen hadir sebagai rencana dari lembaga pendidikan dalam upaya untuk mencerdaskan dan mengupayakan untuk menanamkan nilai karakter bangsa dari sisi spiritualitas. PAK yang dipandang oleh masyarakat hanya sebagai mata pelajaran atau sebuah penanaman nilai karakter diharapkan mampu lebih luas lagi untuk menyampaikan nilai pendidikan yang dapat berkembang di dalam masyarakat Indonesia bahkan untuk jemaat agar pengajaran tidak bersifat eksklusif yang hanya terpaku kepada pendidikan Kristen saja tetapi pengajaran umum yang dapat disangkut pautkan dalam kehidupan orang Kristen bahkan dapat dipengaruhi oleh masyarakat dan jemaat seperti politik yang pada umumnya merubah pendapat orang di dalam gereja bahkan di masyarakat.

Kehidupan orang Kristen tidak terlepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara, ketika orang Kristen memiliki hak dan tanggungjawab di dalam gereja maka orang Kristen pasti memiliki hak dan tanggungjawab sebagai warga negara, dalam hal inilah bagi orang Kristen perlu pemahaman yang Alkitabiah tentang hubungan gereja atau orang Kristen dengan negara atau pemerintah. Pada

prinsipnya gereja memahami bahwa kehadirannya adalah sebagai garam dan terang di tengah-tengah dunia.

Peran gereja dalam politik adalah misi gereja untuk kedamaian dan kemakmuran bagi semua ciptaan (Knitter, 2016:25). Politik Kristen yang peneliti jelaskan bukanlah tentang kekuasaan atau kepentingan diri sendiri, tetapi politik untuk mendidik warga jemaat untuk melayani dan memperjuangkan kepentingan umum demi kebaikan semua orang dan seluruh ciptaan.

Pandangan jemaat terhadap politik masih memandang bahwa politik hanya bisa dijalankan pada politik pemerintahan, dan gereja tidak boleh mencampuri urusan tersebut dalam bentuk apapun, secara otomatis gereja bahkan jemaat menganggap bahwa politik tidak perlu ada di dalam gereja dan gereja sering menganggap bahwa politik itu kotor yang mengakibatkan kurangnya partisipasi gereja yang juga merupakan warga negara.

Seperti halnya Gereja Protestan Indonesia di Gorontalo (GPIG) jemaat Imanuel Kaaruyan dimana menganggap politik sebagai urusan yang tidak penting untuk dirumuskan atau disampaikan di dalam gereja dan tidak berpengaruh pada gereja kedepannya sehingga gereja bersifat eksklusif terhadap masalah politik yang ada. Memang jika dicampuri antara urusan politik dan urusan gereja akan bersifat dualisme tetapi politik yang dimaksud disini ialah pendidikan politik yang bersifat mendidik artinya pemahaman politik atau pendidikan mengenai arti dan fungsi politik yang disampaikan melalui Pembinaan Warga Gereja untuk mempersiapkan warga jemaat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan seperti pada kegiatan pemilihan umum.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitik. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Margono, 2007:36). Berfokus pada Pembinaan Warga Gereja untuk pendidikan Politik di GPIG Jemaat Imanuel Kaaruyan Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembinaan Warga Gereja

Kata “pembinaan” berasal dari kata “bina”. Bila melihat ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat ditemukan bahwa kata “bina” berarti “mengusahakan supaya lebih baik (maju, sempurna, dan sebagainya)”. Sedangkan arti kata “pembinaan” adalah proses, cara, usaha, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Kata “warga gereja” dalam bahasa Yunani ialah “laikol”, yang berarti “semua anggota dalam tubuh Kristus, yaitu gereja secara rohaniah, yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat, terdaftar sebagai anggota dalam sebuah gereja lokal, dan juga turut mengambil bagian dalam pelayanan gerejawi (Nainggolan, 2008:25). Berdasarkan pengertian dari kedua istilah tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pembinaan Warga Gereja adalah suatu usaha pembinaan yang berpusat pada Kristus, berdasarkan pengajaran Alkitab, dan merupakan proses untuk menghubungkan kehidupan warga jemaat dengan Firman Tuhan, melalui pembimbingan dan pendewasaan dalam Kristus melalui kuasa Roh Kudus.

Pembinaan Warga Gereja merupakan salah satu hakikat tugas gereja yang penting. Apabila tugas PWG dilupakan, maka gereja sudah melupakan salah satu hakikat tugasnya yang hakiki. PWG dilaksanakan dalam rangka memungkinkan warga jemaat menjadi alat kesaksian atau mediator berkat Allah kepada sesamanya (di dalam: keluarga, gereja, dan masyarakat luas). Oleh karena itu, guru atau tenaga pembina dalam PWG merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan PWG di sebuah gereja lokal. Kehidupan manusia (warga jemaat) memiliki kompleksitas kebutuhan yang memerlukan solusi yang tepat. Pelaksanaan tugas gereja harus bersifat menyeluruh, artinya menyentuh seluruh kebutuhan umat manusia atau warga jemaat (Cannistraci, 2004:177). Pelaksanaan tugas PWG dalam suatu gereja memerlukan perencanaan yang cermat serta terukur sehingga memberikan dampak signifikan bagi kehidupan kongkrit warga gereja dalam menghadapi masalah yang terjadi di dalam gereja.

PWG juga termasuk dalam katekisasi yang dapat diartikan sebagai pengajaran, pendalaman dan pendidikan iman agar seorang Kristiani yang berupa penyampaian ajaran iman, pewartaan Kristus, pendidikan, pengukuhan serta

pendewasaan yang diberikan oleh gereja kepada jemaatnya (Telaubanua, 2016:4). Untuk itu gereja dalam mendewasakan warganya agar tetap dapat mengalami proses pembelajaran dan perubahan diri terus menerus.

Kualitas rohani warga jemaat tidaklah terjadi secara tiba-tiba, tetapi terjadi lewat pengalaman beribadah, berdoa, bersekutu, dan mempelajari Firman Allah. Warga jemaat adalah pribadi-pribadi yang perlu bertumbuh dan berkembang menuju kedewasaan rohani. Mutu rohani warga jemaat tidak datang dengan sendirinya tanpa pengajaran dan pembinaan. Pengajaran, pendidikan dan pelatihan adalah jalan utama untuk mencapai pertumbuhan rohani. Setelah pertobatan, baptisan dan menerima Roh Kudus, gereja tidak boleh berhenti dalam pembinaan warga gereja lewat pendidikan lainnya (Telabanua, et al., 2016:5) Dapat disimpulkan bahwa Pembinaan Warga Gereja adalah suatu usaha pembinaan yang berpusat pada Kristus, berdasarkan pengajaran Alkitab, dan merupakan proses untuk menghubungkan kehidupan warga jemaat dengan Firman Tuhan, melalui pembimbingan dan pendewasaan dalam Kristus melalui kuasa Roh Kudus. Pengajaran, pendidikan dan pelatihan adalah jalan utama untuk mencapai pertumbuhan rohani. Setelah pertobatan, baptisan dan menerima Roh Kudus, gereja tidak boleh berhenti dalam pembinaan warga gereja.

Dalam hal ini PWG tidak lepas dari PAK sebagai wadah pembelajaran di jemaat. Pendidikan Agama Kristen adalah usaha sadar terencana untuk meletakkan dasar Yesus Kristus dalam pertumbuhan iman kepada Kristus dengan cara mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, yaitu melandaskan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Oleh karena itu PAK meletakkan dasar orientasinya pada pengajaran dan tindakan Yesus Kristus (Harianto, 2012:52).

Pendidikan Politik

Dilihat dari sisi etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni polis yang berarti kota yang berstatus negara kota (city state) (Hidajat Iman, 2010:9). Dalam negara kota di zaman Yunani, orang saling berinteraksi guna mencapai kesejahteraan (kebaikan, menurut Aristoteles) dalam hidupnya (Seta, 2013:3) Politik

yang berkembang di Yunani kala itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa ilmu politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam sistem suatu negara, yakni pengambilan kebijakan-kebijakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan tertentu. Ilmu politik memusatkan tinjauannya kepada masalah kekuasaan dan bagaimana jalannya tenaga kekuasaan dalam masyarakat dan susunan negara, ilmu politik dengan sendirinya membahas dan mempersoalkan pembinaan negara dan masyarakat atau kekuasaan (Sakti, 2020:6). Dengan kata lain ilmu politik bersifat membahas proses-proses yang berlangsung dalam suatu negara, seperti kekuasaan dan susunan masyarakat mengenai ilmu politik tersebut.

Dalam suatu polis ketika zaman itu setiap penduduk mempunyai kedudukan yang sama. Apabila ada sesuatu yang baru, mereka berunding bersama di auditoria. Auditoria adalah tempat bermusyawarah atau balai. Mereka mengemukakan pendapat, kemudian mengambil keputusan bersama. Sifat keputusan bersama itulah yang disebut politik. Itulah sebabnya politik adalah semua pembicaraan dari poltheia yang berisi penyelenggaraan pemerintahan pengembangan negara, pembangunan negara dan sebagainya yang bersifat konstruktif (Brotosudarmo, 2013:123).

Pemikiran mengenai politik pun khususnya bagian di dunia barat banyak dipengaruhi oleh filsuf Yunani Kuno. Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap politics sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik (Miriam, 2014:14). Namun demikian, definisi politik hasil pemikiran para filsuf tersebut belum mampu memberi tekanan terhadap upaya-upaya praksis dalam mencapai masyarakat yang baik. Meskipun harus diakui, pemikiran-pemikiran politik yang berkembang dewasa ini juga tidak lepas dari pengaruh para filsuf tersebut.

Pendidikan Politik di Gereja

Pandangan Leimena yang dikutip oleh Frans (Hitipeuw, 1986:165) mengemukakan bahwa konfrontasi menganalisis situasi di Indonesia tepat dan agak mendalam. Krisis kepemimpinan sebenarnya adalah kekurangan akan norma etik. Yohanes Leimena berpendapat bahwa fungsi gereja di tengah-tengah dunia dan masyarakat, bukan saja berarti gedung yang indah, terutama sebagai persekutuan orang yang percaya dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Gereja seharusnya menjadi terang dan garam dunia sebagai tanda nyata dalam masyarakat, tanda

keselamatan juga dan harapan bukan saja dari dunia yang akan datang, tetapi juga dunia sekarang.

Dapat disimpulkan bahwa pernyataan Leimena, mengenai masalah ini bahwa dunia hidup dalam suatu krisis total yaitu krisis politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan di mana masyarakat yang tidak mau tahu akan nasib bangsa sehingga tuntutan masyarakat cenderung kepada masalah ekonomi karena menjadi kebutuhan secara jasmani akan hal itu.

Suatu penelitian yang dengan tegas menyimpulkan adanya korelasi yang utuh antara agama dengan politik, termasuk sosial dan ekonomi diungkapkan oleh Arend Van Leeuwen. Konsepsi budaya dan politik yang ada di kota-kota tua, ternyata tidak lepas dari tradisi keagamaan. Bahkan bangunan-bangun fisik pada pusat-pusat budaya dan politik merupakan pencerminan dari konsepsi terhadap Tuhan. Penelitiannya terhadap Babilonia misalnya, memberi keyakinan bagi Van Leeuwen untuk menyimpulkan korelasi yang sangat erat antara tradisi keagamaan dengan konsepsi budaya dan politik (Leeuwen, 1997:13). Ketika agama memberikan legitimasi politis kepada kedaulatan yang diwakili negara, maka kekuasaan yang mencakup makna segala kehidupan menjadi realitas politik itu sendiri.

Gereja membutuhkan politik hal ini bisa dilihat dari ciri yang paling khas dari politik didasarkan pada perseptif Alkitab, atau Kerajaan Allah itu, adalah hadirnya suatu tatanan kehidupan yang memungkinkan seluruh insan ciptaan Tuhan dapat hidup dalam kesejahteraan, keadilan, kejujuran dan kebenaran (Saut, 2001:24). Dapat disimpulkan bahwa gereja harus aktif mempengaruhi kebijakan negara melalui politik dan gereja tidak bisa menarik diri atau diam terhadap proses politik.

Dari segi ini kehidupan gereja perlu menjadi model kehidupan demokrasi yang mengajari mereka yang di luar gereja tentang nilai-nilai demokrasi. Sehingga tepatlah apa yang dikatakan oleh Gruchy (2003:296), bahwa merupakan suatu kemustahilan untuk kita memahami misi gereja terpisah dari sebuah tatanan dunia yang adil atau untuk mempertimbangkan peran gereja kecuali dalam relasi dengan kebutuhan dan kepedulian atas kemanusiaan dan ciptaan sebagai satu kesatuan.

Dasar Alkitabiah

Pembinaan Warga Gereja mengenai pendidikan politik adalah meyakini para jemaat bahwa mereka juga punya hak dan kewajiban dalam bernegara, seperti yang terdapat dalam kitab Yeremia 29:7 “usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu”, menyatakan perintah Tuhan untuk “mensejahterahkan” dan “berdoalah” yang mempunyai arti menjadi pendamai dalam relasi dan aktivitas kehidupan kita sehari-hari dan juga menjadi pendamai yang aktif dalam mengusahakan kesejahteraan baik bagi gereja maupun bagi seluruh anggota masyarakat. Dalam teks ini menjelaskan bahwa sebuah perintah untuk tetap mengusahakan dan mendoakan sebagai gembala yang terus membina warga jemaatnya. Pembinaan Warga Gereja diharapkan tetap terus mendidikan warga jemaatnya agar supaya jemaat tahu perannya bukan saja tentang ibadah tetapi kepeduliannya tentang sesama di dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Pendidikan politik juga membuka wawasan bagaimana kewajiban kita sebagai warga gereja dan warga negara tentang perpuluhan di gereja dan pajak di negara, agar terus berjalan secara organisasi gereja bahkan secara negara, seperti dalam Matius 22:15-22 tentang membayar pajak kepada Kaisar. Bukan main-main penderitaan Kristus itu, ketika Ia tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap diriNya dari pihak orang-orang berdosa dan mengalami jert yang mereka pasang dalam upaya mencari jalan untuk menangkap Dia dengan berbagai alasan. Dalam ayat-ayat ini, bagaimana Yesus diserang dengan sebuah pertanyaan oleh orang-orang Farisi dan Herodian tentang membayar pajak kepada Kaisar. Dua kewarganegaraan, dua kewajiban, satu hati. Kristen di Indonesia memiliki dua kewarganegaraan: Indonesia dan Surga, dua kewajiban: terhadap pemerintahan RI dan Tuhan, tetapi keduanya ini harus diwujudkan dalam kebulatan dan keutuhan hati, karena keduanya memang satu keutuhan pengabdian. Inilah yang dipertegas Yesus ketika menanggapi pertanyaan yang menjerat dari orang-orang Farisi yang mendapatkan dukungan dari orang-orang Herodian, yakni anggota-anggota suatu partai Yahudi yang menghendaki keturunan Herodes Agung yang memerintah atas mereka dan bukan gubernur Romawi. Mereka memperkirakan Yesus akan menjawab dengan “ya” atau “tidak” terhadap pertanyaan mereka. Yesus tahu maksud pertanyaan ini dan apa resikonya bila menjawab dengan salah satu di

antara jawaban di atas. Jawaban “ya” akan menimbulkan kemarahan mereka karena mengalami penderitaan di bawah jajahan Romawi, sedangkan jawaban “tidak” akan memancing kemarahan pemerintahan Romawi. Yesus menegur keras kejahatan dan kemunafikan hati mereka, serta dengan bijaksana menjawab pertanyaan mereka. Jawaban Yesus telah menggagalkan niat hati mereka yang jahat dan menelanjangi kemunafikan mereka.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Pembinaan Warga Gereja untuk Pendidikan Politik di GPIG Jemaat Imanuel Kaaruyan, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, dengan begitu banyak halangan yakni pelaksanaan PWG untuk pendidikan politik di jemaat Imanuel Kaaruyan menunjukkan bahwa tidak ada pelaksanaannya dengan jelas, politik uang dapat mempengaruhi jemaat yang ada dan hanya disinggung sedikit dalam khotbah.

Faktor-faktor yang menunjang dan menghambat Pembinaan Warga Gereja untuk Pendidikan Politik di GPIG Jemaat Imanuel Kaaruyan, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, yaitu untuk faktor yang menunjang berupa banyak sumber daya manusia yang dimiliki oleh jemaat Imanuel Kaaruyan, sarana dan prasarana yang sangat menunjang dalam memfasilitas kegiatan dan kesiapan jemaat dalam menerima pendidikan tersebut disebabkan karena banyaknya anggota jemaat yang mempunyai pendidikan yang tinggi, sedangkan untuk faktor yang menghambat yaitu ditunjukan dengan politik kotor yang dipahami oleh anggota jemaat, pemahaman kaum awam yang terlihat dari wawancara bahwa status sosial yang rendah dan dana yang tidak dialokasikan menyebabkan kendala untuk diberikan pemahaman tentang pendidikan politik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menuliskan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah terlibat atau telah membantu pelaksanaan penelitian dan penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Brotosudarmo, R.M. Drie S. (2017). *Pembinaan Warga Gereja selaras dengan Tantangan Zaman*, Yogyakarta: Andi.

Cannistraci David. (2004). *Visi Allah untuk Gereja*, Malang: Gandum Mas.

- Knitter F. Paul. (2016). *Satu Bumi Banyak Agama Dialog Multi-Agama Dan Tanggung Jawab Global*. Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Leeuwen, Arend Th Van. (1997). *Agama Kristen dalam Sejarah Dunia*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Margono. (2007). *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineke Cipta.
- Nainggolan, John M. (2008). *Strategi Pendidikan Warga Gereja*, Bandung: Generasi Info Media
- Sakti Tri Fadjar. (2020). *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati
- Telaumbanua, Marinus. (2016) *Ilmu Katekatika: Hakikat, Metode dan Peserta Katekese Gerejawi*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.

